



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya beberapa jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomot 27 Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

d
f
f

- 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 75);
 9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 284);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.



Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 20) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 28 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 133);
- b. Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 284);

diubah sebagai berikut:

Daftar Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 Desember 2021
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021... NOMOR 98.....

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 38 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 BUPATI KUBU RAYA NOMOR 20 TAHUN 2011
 TENTANG PENETAPAN JABATAN
 FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KUBU RAYA

DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL/INSTANSI | NO. KEPUTUSAN/ TANGGAL | INSTANSI PEMBINA |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Perawat | 94/KEP/M.PAN/11/2001 tanggal 07 November 2001 | Kementerian Kesehatan |
| 2 | Dokter | 139/KEP/M.PAN/11/2003 tanggal 7 November 2003 | Kementerian Kesehatan |
| 3 | Dokter Gigi | 141/KEP/M.PAN/11/2003 tanggal 11/ 7/ 2000 | Kementerian Kesehatan |
| 4 | Pengawas Farmasi dan Makanan | 48/KEP/M.PAN/8/2002 tanggal 16 Agustus 2002 | Kementerian Kesehatan |
| 5 | Apoteker | Permenpan dan RB Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 6 April 2021 | Kementerian Kesehatan |
| 6 | Asisten Apoteker | PER/08/M.PAN/4/2008 tanggal 15 April 2008 | Kementerian Kesehatan |
| 7 | Pranata Laboratorium Kesehatan | PER/08/M.PAN/3/2006 tanggal 28 Maret 2006 | Kementerian Kesehatan |
| 8 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2015 tanggal 9 Maret 2015 | Kementerian Kesehatan |
| 9 | Epidemiolog Kesehatan | 17/KEP/M.PAN/11/2000 tanggal 30 November 2000 | Kementerian Kesehatan |
| 10 | Entomolog Kesehatan | 18/KEP/M.PAN/11/2000 tanggal 30 November 2000 | Kementerian Kesehatan |
| 11 | Sanitarian | Per/10/M.PAN/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 | Kementerian Kesehatan |
| 12 | Perawat Gigi | Permenpan dan RB Nomor 23 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 | Kementerian Kesehatan |
| 13 | Nutrisionis | 23/KEP/M.PAN/4/2001 tanggal 4 April 2001 | Kementerian Kesehatan |
| 14 | Bidan | Permenpan dan RB Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 | Kementerian Kesehatan |
| 15 | Fisioterapis | PER/12/M.PAN/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 | Kementerian Kesehatan |
| 16 | Terapis Wicara | PER/48/M.PAN/4/2005 tanggal 21 April 2005 | Kementerian Kesehatan |
| 17 | Teknisi Gigi | PER/06/M.PAN/4/2007 tanggal 30 April 2007 | Kementerian Kesehatan |
| 18 | Psikolog Klinis | PER/11/M.PAN/5/2008 tanggal 26 Mei 2008 | Kementerian Kesehatan |
| 19 | Perekam Medis | Permenpan dan RB Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 14 Agustus 2013 | Kementerian Kesehatan |
| 20 | Radiografer | Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2013 tanggal 14 Agustus 2013 | Kementerian Kesehatan |
| 21 | Terapis Tranfusi Darah | PER/05/M.PAN/4/2007 tanggal 30 April 2007 | Kementerian Kesehatan |

Handwritten signature/initials

| | | | |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 22 | Pembimbing Kesehatan Kerja | Permenpan dan RB Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 | Kementerian Kesehatan |
| 23 | Guru | Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| 24 | Pengawas Sekolah | Permenpan dan RB Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| 25 | Pamong Belajar | Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 6 Juli 2010 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| 26 | Penilik | Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Juli 2010 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| 27 | Pengembang Teknologi Pembelajaran | Permenpan dan RB Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 16 Oktober 2017 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| 28 | Pranata Laboratorium Pendidikan | Permenpan dan RB Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| 29 | Polisi kehutanan | Permenpan dan RB Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 11 Oktober 2019 | Kementerian Kehutanan |
| 30 | Pengendali Ekosistem Hutan | Permenpan dan RB Nomor 74 Tahun 2020 tanggal 9 November 2020 | Kementerian Kehutanan |
| 31 | Penggerak Swadaya Masyarakat | Permenpan dan RB Nomor 28 Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 32 | Pengantar Kerja | Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 27 April 2017 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 33 | Perantara Hubungan Industrial | 40/KEP/M.PAN/12/2000 tanggal 22 Desember 2000 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 34 | Mediator Hubungan Industrial | Permenpan dan RB Nomor 83 Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 35 | Pengawas ketenagakerjaan | Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 17 November 2016 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 36 | Pekerja Sosial | Permenpan dan RB Nomor 33 Tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020 | Kementerian Sosial |
| 37 | Penyuluh Sosial | PER/06/M.PAN/4/2008 tanggal 9 April 2008 | Kementerian Sosial |
| 38 | Penguji Mutu Barang | Permenpan dan RB Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 | Kementerian Perdagangan |
| 39 | Penera | Permenpan dan RB Nomor 32 Tahun 2014 tanggal 2 Oktober 2014 | Kementerian Perdagangan |
| 40 | Asesor Manajemen Mutu Industri | Permenpan dan RB Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 16 Oktober 2014 | Kementerian Perindustrian |
| 41 | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan | KEP/04/M.PAN/1/2005 tanggal 13 Januari 2005 | Kementerian Perindustrian |
| 42 | Penyuluh Pertanian | Permenpan dan RB 35 tahun 2021 tanggal 20 Mei 2021 | Kementerian Pertanian |
| 43 | Pengendali Orgasme Pengganggu Tumbuhan | PER/10/M.PAN/05/2008 tanggal 23 Mei 2008 | Kementerian Pertanian |
| 44 | Pengawas Benih Tanaman | Permenpan dan RB Nomor 09 Tahun 2010 tanggal 23 April 2010 | Kementerian Pertanian |

8
/

| | | | |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 45 | Medik veteriner | Permenpan dan RB Nomor 52 Tahun 2012 tanggal 29 Agustus 2012 | Kementerian Pertanian |
| 46 | Paramedik Veteriner | Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2012 tanggal 29 Agustus 2012 | Kementerian Pertanian |
| 47 | Pengawas Bibit Ternak | Permenpan dan RB Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 27 Januari 2011 | Kementerian Pertanian |
| 48 | Pengawas Mutu Pakan | Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 10 Mei 2013 | Kementerian Pertanian |
| 49 | Pengawas Mutu Hasil Pertanian | Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 | Kementerian Pertanian |
| 50 | Analisis Pasar Hasil Pertanian | Permenpan dan RB Nomor 23 Tahun 2013 tanggal 21 Februari 2013 | Kementerian Pertanian |
| 51 | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan | Permenpan dan RB Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| 52 | Pengawas Benih Ikan | PER/52/M.PAN/4/2005 tanggal 25 Mei 2005 | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| 53 | Pengawas Perikanan | Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 26 September 2017 | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| 54 | Penyuluh Perikanan | PER/19/M.PAN/10/2008 tanggal 20 Oktober 2008 | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| 55 | Analisis Pasar Hasil Perikanan | Permenpan dan RB Nomor 55 Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| 56 | Pengawas Keselamatan Pelayaran | KEP/195/M.PAN/12/2004 tanggal 10 Desember 2004 | Kementerian Perhubungan |
| 57 | Penguji Kendaraan Bermotor | 150/KEP/M.PAN/11/2003 tanggal 21 November 2003 | Kementerian Perhubungan |
| 58 | Inspektur Tambang | Permenpan dan RB Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 11 Desember 2017 | Kementerian Energi dan SDM |
| 59 | Inspektur Ketenagalistrikan | Permenpan dan RB Nomor 32 Tahun 2017 tanggal 11 Desember 2017 | Kementerian Energi dan SDM |
| 60 | Penilai Pajak Bumi dan Bangunan | Permenpan dan RB Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 | Kementerian Keuangan |
| 61 | Penyuluh Pajak | Permenpan dan RB Nomor 49 Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020 | Kementerian Keuangan |
| 62 | Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif | Permenpan dan RB Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 63 | Pamong Budaya | Permenpan dan RB Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 64 | Kataloger | PER/07/KEP/M.PAN/5/2007 tanggal 3 Mei 2007 | Kementerian Pertahanan |
| 65 | Penata Ruang | Permenpan dan RB Nomor 78 Tahun 2020 tanggal 30 November 2020 | Kementerian Pekerjaan Umum |
| 66 | Teknik pengairan | 63/KEP/M.K.WASPAN/10/1999 tanggal 1 Oktober 1999 | Kementerian Pekerjaan Umum |
| 67 | Teknik Jalan dan Jembatan | 64/KEP/M.K.WASPAN/10/1999 tanggal 1 Oktober 1999 | Kementerian Pekerjaan Umum |
| 68 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan | 65/KEP/M.K.WASPAN/10/1999 tanggal 1 Oktober 1999 | Kementerian Pekerjaan Umum |

| | | | |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 69 | Teknik Penyehatan Lingkungan | 66/KEP/M.K.WASPAN/10/1999 tanggal 1 Oktober 1999 | Kementerian Pekerjaan Umum |
| 70 | Perancang Peraturan Perundang-undangan | 41/KEP/M.PAN/12/2000 tanggal 22 Desember 2000 | Kementerian Hukum dan HAM |
| 71 | Analisis Hukum | Permenpan dan RB Nomor 51 Tahun 2020 tanggal 7 Juli 2020 | Kementerian Hukum dan HAM |
| 72 | Pranata Komputer | Permenpan dan RB Nomor 32 Tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020 | Badan Pusat Statistik |
| 73 | Statistisi | Permenpan dan RB Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 29 April 2013 | Badan Pusat Statistik |
| 74 | Pengendali Dampak Lingkungan | Permenpan dan RB nomor 30 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 | Kementerian Lingkungan Hidup |
| 75 | Pengawas Lingkungan Hidup | Permenpan dan RB Nomor 22 Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 | Kementerian Lingkungan Hidup |
| 76 | Penerjemah | Permenpan dan RB Nomor 49 Tahun 2014 tanggal 16 Oktober 2014 | Sekretariat Negara |
| 77 | Analisis SDM Aparatur | Permenpan dan RB Nomor 37 Tahun 2020 tanggal 2 Juni 2020 | Badan Kepegawaian Negara |
| 78 | Auditor Kepegawaian | Permenpan dan RB Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 17 Juli 2012 | Badan Kepegawaian Negara |
| 79 | Auditor | PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 | BPK dan BPKP |
| 80 | Arsiparis | Permenpan dan RB Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 30 Agustus 2016 | Arsip Nasional Republik Indonesia |
| 81 | Pustakawan | Permenpan dan RB Nomor 9 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 | Perpustakaan Nasional |
| 82 | Penyuluh Keluarga Berencana | Permenpan dan RB Nomor 21 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 | BKKBN |
| 83 | Perencana | Permenpan dan RB Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 6 Maret 2020 | BAPPENAS |
| 84 | Surveyor Pemetaan | Permenpan dan RB Nomor 27 Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 | Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional |
| 85 | Mangala Informatika | Permenpan dan RB Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| 86 | Operator Transmisi Sandi | Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003 tanggal 3 November 2003 | Lembaga Sandi Negara |
| 87 | Sandiman | Permenpan dan RB Nomor 18 Tahun 2019 tanggal 2 September 2019 | Lembaga Sandi Negara |
| 88 | Pranata Hubungan Masyarakat | Permenpan dan RB Nomor PER/109/M.PAN/11/2005 tanggal 1 November 2005 | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| 89 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah | Permenpan dan RB Nomor 36 Tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020 | Kementerian Dalam Negeri |
| 90 | Analisis Kebijakan | Permenpan dan RB Nomor 45 Tahun 2013 tanggal 4 November 2013 | Lembaga Administrasi Negara |
| 91 | Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa | Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |

| | | | |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 92 | Perisalah Legislatif | Permenpan dan RB Nomor 26 Tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2017 | Sekretariat Jendral DPR |
| 93 | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah | Permenpan dan RB Nomor 42 Tahun 2014 tanggal 16 Oktober 2014 | Kementerian Keuangan |

BUPATI KUBU RAYA, 

MUDA MAHENDRAWAN 

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ~~24~~...~~Desember~~ 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ~~2021~~... NOMOR ~~98~~.....